



DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

RENSTRA

Rencana Strategis
2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan hidayah – Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2025-2029 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Binjai disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan serta aspirasi masyarakat.

Renstra Pendidikan Kota Binjai Tahun 2025-2029 ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Binjai selama 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Pendidikan Kota Binjai Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagai penggerak sektor pembangunan pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan diharapkan dapat mendukung program pemerintah daerah dalam bidang pendidikan.

Binjai, September 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI**



Salyan Syahputera Siregar, S.STP, M.AP
Pembina TK I
NIP. 19870331 200602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan hukum.....	3
1.3 Maksud dan tujuan.....	5
1.4 Sistematika penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	7
2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan.....	7
2.2 Sumber daya Dinas Pendidikan.....	15
2.3 Target pencapaian indikator Dinas Pendidikan.....	20
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan.....	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.....	36
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	54
3.3 Telaah renstra K/L dan renstra Provinsi.....	56
3.4 Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis	63
3.5 Penentuan isu-isu strategis.....	67
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	68
4.1. Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan	68
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	75
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	99
BAB VIII PENUTUP	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disusun sebuah Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana organisasi/instansi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu lima tahun dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan.

Rencana Strategis memiliki fungsi dalam pemilihan tujuan-tujuan organisasi/instansi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Ada beberapa kebijakan yang telah ditempuh oleh Dinas Pendidikan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang, RPJMD, Rencana Strategis Kemendikdasmen dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal tersebut Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan pokok pendidikan, yaitu: peningkatan kualifikasi guru, transformasi pembelajaran, penguatan karakter siswa, pemenuhan sarana prasarana, serta perluasan akses pendidikan.

Dalam bidang pendanaan, Pemerintah Pusat telah memberikan Biaya Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Siswa Miskin. Selain itu juga mempunyai komitmen untuk membiayai kebutuhan pendidikan di daerah secara patungan antara Pemerintah Pusat (50%), Provinsi (20%) dan Kabupaten/Kota (30%), baik dalam peningkatan sarana dan prasarana termasuk

juga dalam menyosong Pendidikan Menengah Universal, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Rancangan BOS untuk Pendidikan Menengah.

Dalam bidang peningkatan kompetensi guru, telah diterbitkan UU RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana persyaratan kualifikasi tenaga pendidik minimal S-1/D-4 dan berhak atas sertifikasi dengan ketentuan melaksanakan UKG.

Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (Inpres No 5 tahun 2006).

Untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, di dalam RPJMD 2025-2029 Kota Binjai telah menetapkan misi : Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP. Misi ini berkontribusi pada visi "Sejahtera" dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik, dan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan di atas, Dinas Pendidikan Kota Binjai telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing bangsa, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik baik di sekolah formal maupun non formal. Namun demikian mengingat besar dan luasnya cakupan sasaran pengelolaan bidang pendidikan di Kota Binjai, ada beberapa indikator kondisi pendidikan yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pendidikan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Bertolak dari kebijakan dan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Binjai dan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Binjai.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Binjai disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal; memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini landasan hukum penyusunan Renstra.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan wajib daerah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan mencakup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non-formal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025– 2029;
12. Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
13. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 mengatur tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Binjai;
18. Peraturan Walikota nomor 29 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra ini merupakan dokumen induk perencanaan bagi Dinas Pendidikan Kota Binjai. Sebagai dokumen induk Renstra Dinas Pendidikan Kota Binjai harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat Dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Binjai adalah memberikan arah pelaksanaan/penyelenggaraan pembangunan pendidikan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Binjai. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renjata) dan RAPBD.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Binjai berisikan program- program kerja yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Tercapainya sasaran Dinas Pendidikan Kota Binjai beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kota Binjai. Sehingga tercapainya sasaran Dinas Pendidikan Kota Binjai harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kota Binjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan
- 2.2 Sumber daya Dinas Pendidikan
- 2.3 Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaah renstra K/L dan renstra Provinsi
- 3.4 Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, diuraikan tugas pokok Dinas Pendidikan

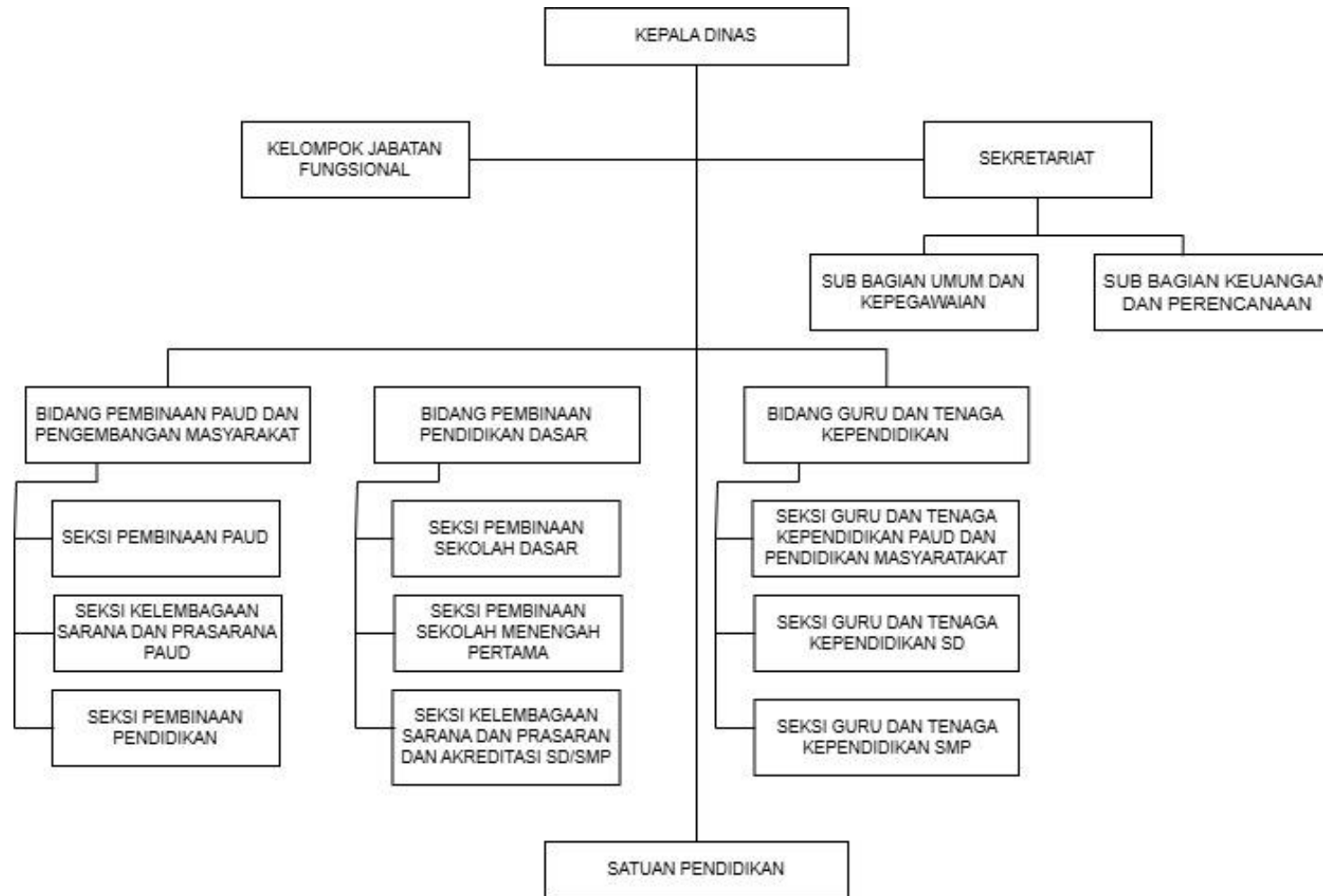
“Membantu Walikota dalam menyelenggarakan pembangunan di Bidang Pendidikan”.

Sedangkan fungsinya adalah

1. Melaksanakan rumusan dan kebijakan teknis memberi bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan kepala daerah;
2. Melaksanakan pembinaan pengembangan di bidang pendidikan umum baik peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana maupun tenaga pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Kebijakan Daerah Kota Binjai;
4. Melakukan urusan pengelolaan ketatausahaan dinas.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang sebagaimana pada gambar 2.1



Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

TUGAS

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Tim Perencanaan dan Keuangan. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program.

FUNGSI

1. Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, bidang umum dan kepegawaian, perencanaan evaluasi dan pelaporan (PEP), serta keuangan
2. Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, Perencanaan Evaluasi Pelaporan (PEP) serta keuangan
3. Melaksanakan pengendalian tugas dan fungsi pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan dinas
4. Menyusun program kegiatan bidang, umum dan kepegawaian, keuangan monitoring serta program perencanaan evaluasi dan pelaporan dinas
5. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas
7. Melaksanakan dan mengelola bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan
8. Melaksanakan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi dilingkungan Dinas
9. Menyusun program kegiatan bidang, umum dan kepegawaian, keuangan monitoring serta evaluasi data dan pelaporan dinas

10. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
11. Menyusun penerapan Laporan Standar Pelayanan Minimal
12. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
13. Menyusun Laporan Kinerja (LKj), dan Perjanjian Kinerja (PK)
14. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
15. Melaksanakan pengelolaan tata naskah, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana
16. Menyusun analisa jabatan dan analisis beban kerja
17. Melaksanakan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset dinas
18. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan
19. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana dilingkup dinas
20. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan dinas
21. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas

BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

TUGAS

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh Kepala Tim Pembinaan PAUD, Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

FUNGSI

1. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
2. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Bagian di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
3. Melaksanakan, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan

- mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
4. Melaksanakan, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
 5. Melaksanakan, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pemberian Fasilitas di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
 6. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
 7. Melaksanakan, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan koordinasi dan integrasi di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
 8. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
 9. Membuat laporan pelaksanaan fungsi dan tugasnya
 10. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri
 11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
 12. Melaksanakan pengembangan program di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
 13. Melaksanakan pengembangan sumberdaya di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat sesuai kebutuhan daerah
 14. Melaksanakan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

TUGAS

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang dibantu oleh Kepala Tim Pembinaan Sekolah Dasar, Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Akreditasi SD/SMP. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

FUNGSI

1. Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, bidang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
2. Melaksanakan kegiatan program, pembinaan dan pengembangan Teknologi Pendidikan
3. Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
4. Melaksanakan pengkoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya terkait program pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat
5. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas
7. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan program pendidikan untuk SD dan SMP atau yang sederajat, pembinaan dan pengembangan Teknologi Pendidikan, Kurikulum Pendidikan, Pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat, dan menetapkan Kalender Pendidikan, sistem Penerimaan Siswa Baru dan Ujian Akhir Sekolah (UAS)
8. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data program-program pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat
9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait program pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat, pembinaan dan pengembangan Teknologi Pendidikan, Kurikulum Pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat

10. Melaksanakan rekomendasi/izin pendirian pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat
11. Melaksanakan rekomendasi mutasi siswa/validasi siswa
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

TUGAS

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dibantu oleh Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SD dan Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMP

FUNGSI

1. Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan bidang guru dan tenaga kependidikan
2. Melaksanakan pengumpulan, dan pengolahan data pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan
3. Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang guru dan tenaga kependidikan
4. Melaksanakan pengkoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan
5. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas
7. Melaksanakan rencana kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pengolahan formasi, pengembangan, evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan
8. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, data pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan
9. Melaksanakan kegiatan pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi

kinerja guru dan tenaga kependidikan

10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengelolaan formasi, pengembangan dan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai prosedur ketentuan yang berlaku
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan undangan
4. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai Peraturan Perundang-Undangan

2.2. Sumber daya aparatur Dinas Pendidikan

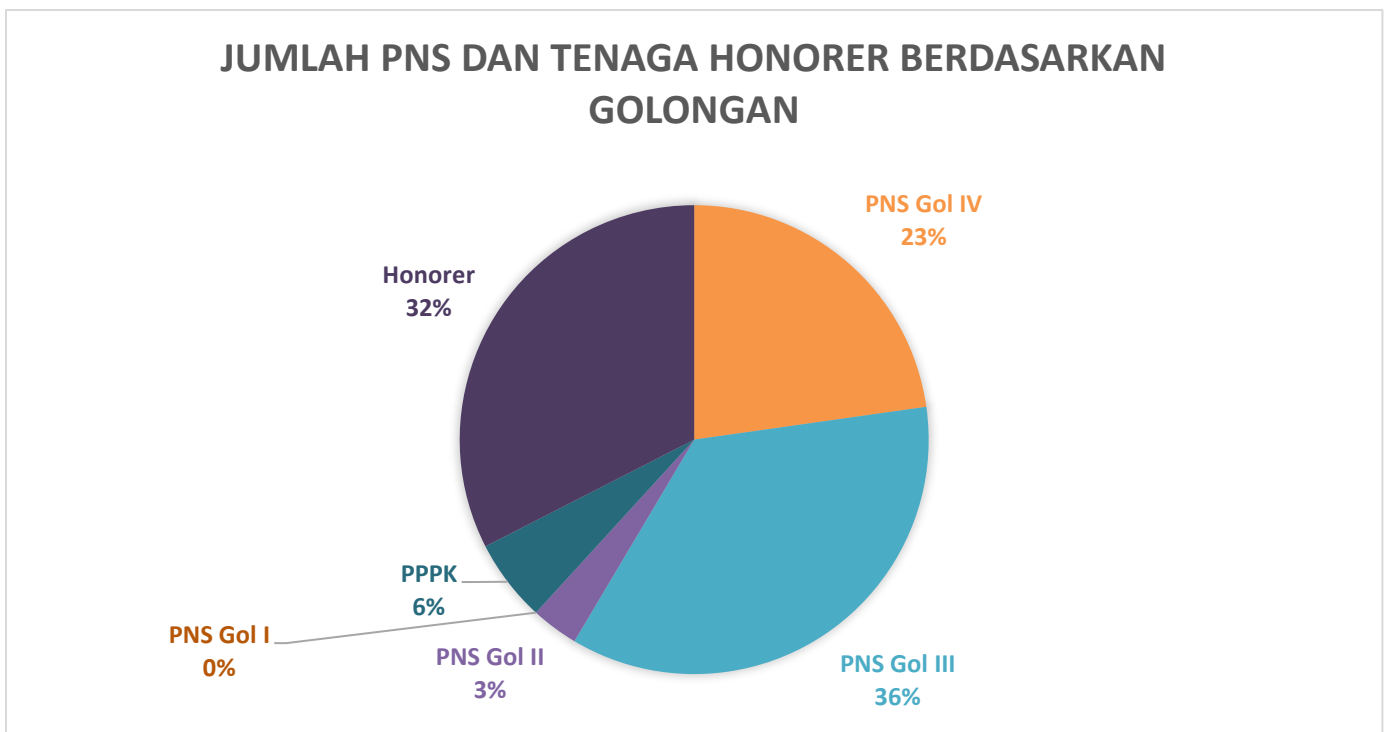
Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai didukung oleh sumberdaya manusia aparatur sebanyak 123 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. 76 orang PNS
2. 7 orang PPPK
3. 40 orang Tenaga Honorer

Secara rinci dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut:

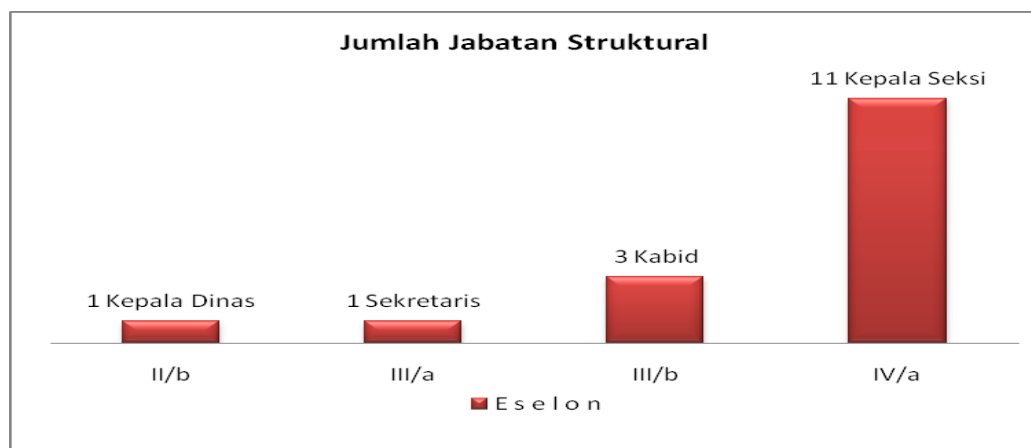
Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan

1	PNS Gol IV	28	Orang
2	PNS Gol III	44	Orang
3	PNS Gol II	4	Orang
4	PNS Gol I	0	Orang
5	PPPK	7	Orang
6	Honorer	40	Orang
	Jumlah	123	Orang



Jumlah jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Telah Diisi	Jabatan Yang Lowongan	KET
1	II/b	1	1	-	Kepala Dinas
2	III/a	1	1	-	Sekretaris
3	III/b	3	3	-	Kabid
4	IV/a	11	11	-	Kasi
Jumlah		16	16	-	-



Jumlah pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat PIM

NO	NAMA/NIP/GOL	Jabatan	Diklat PIM II/ III / IV
1	SUBAKAT MALIK, SE 19880705 201001 1 008 III/c	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	PIM IV
2	ANDIKA SAPUANDA, S.Pd 19850803 201103 1 002 III/c	Katim Perencanaan dan Keuangan	PIM IV
3	IKHDA HASNITA WINDA SARI, S.Pd, M.Psi 19880228 201001 2 023 III/d	Katim Pembinaan PAUD	PIM IV
4	EKO SETIAWAN SITEPU, S.Pd 19830703 201001 1 026 III/d	Kasi Pembinaan Pendidikan Masyarakat	PIM IV
5	DIAN ANGGRAINI, S.Pd 19830918 201001 2 027 III/d	Katim Pembinaan SD	PIM IV

6	CHAISAL ANDRIO, S.Pd 19820617 200903 1 003 III/c	Kasi Pembinaan SMP	PIM IV
7	AUZAR HABIBIE MARPAUNG, SE 19840506 200901 1 001 III/d	Kasi Sarana, Prasarana dan Akreditasi SD / SMP	PIM IV
8	FIRMANSYAH PUTRA SURBAKTI 19831009 200903 1 007 III/d	Kasi GTK SD	PIM IV
9	SITI HANUM SINULINGGA 19790215 201212 2 002 III/c	Katim Pembinaan SMP	PIM IV
10	ADRI RIVANTO, S.STP 19830801 200112 1 004 IV/b	Kasi GTK PAUD dan Dikmas	PIM IV

Sarana dan Prasarana

Kantor Dinas Pendidikan terletak di Jl. Gunung Merapi No. 1 Kota Binjai diatas tanah seluas 1.980 m², dengan bangunan dua lantai yang terdiri atas bangunan 1, 2 dan 4 seluas 84 m³, bangunan 3 seluas 262 m³, bangunan 5 seluas 281 m³, bangunan 7 seluas 336 m³, bangunan 8 seluas 72 m³, dengan bangunan dua lantai seluas 211 m³. Kebutuhan ruang kerja, ruang pertemuan dan gudang arsip belum memadai sesuai dengan tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas belum dapat secara optimal.

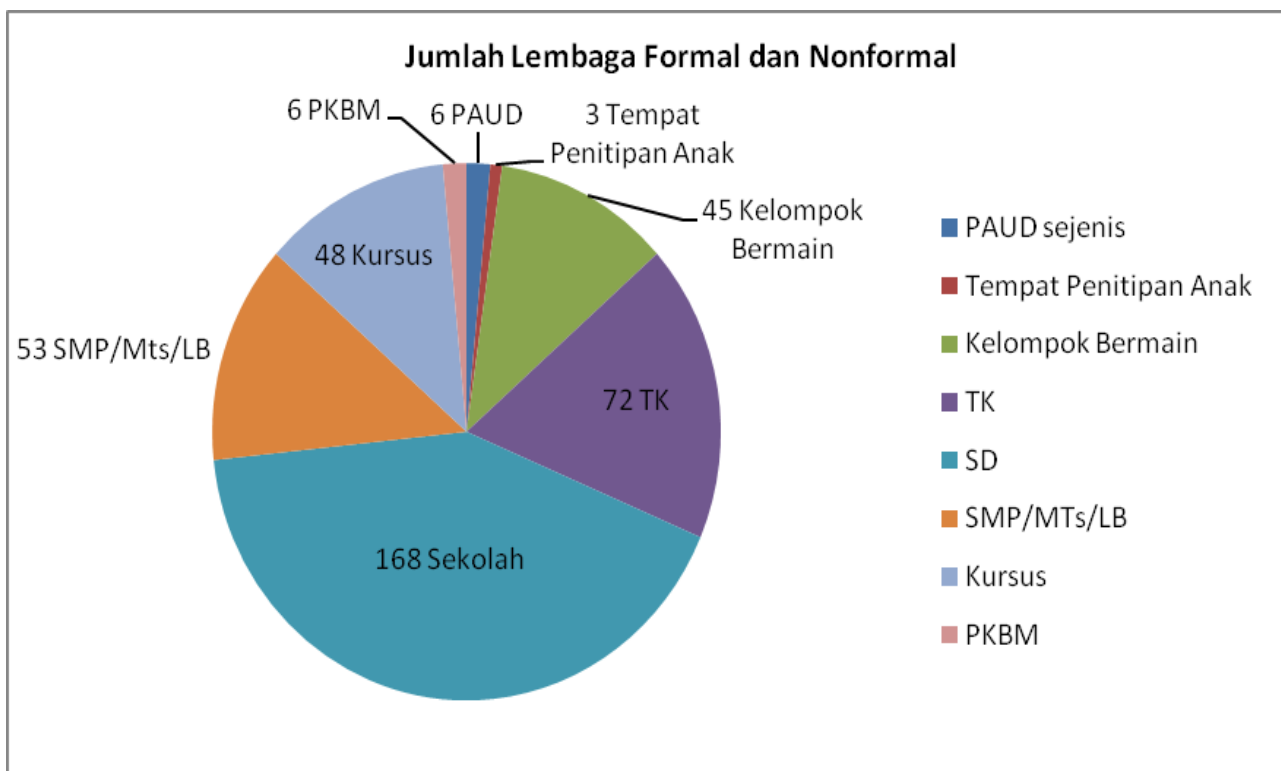
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai telah tersedia sarana dan prasarana lainnya sebagai tabel 2.2 berikut :

Sarana dan Prasarana Kantor

No	Uraian	Kondisi			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1	Mobil	1	-	-	1
2	Sepeda Motor	8	2	12	22
3	Mesin Ketik Standar	1		6	7
4	Mesin Hitung Standar	-	-	6	6
5	Mesin Kalkulator	3	3	-	6
6	Mesin Fotocopy	-	-	1	1
7	Mesin Perekam Stensil Foto	-	-	1	1
8	Rak Besi / Metal	3	3	-	6
9	Filling Besi / Metal	8	6	9	23
10	Band Kas	-	-	1	1
11	Lemari Kaca	3	1	1	5
12	Lemari Kayu	10	6	7	23
13	Alat Penghancur Kertas	1	-	-	1
14	White Board	4	-	-	4
15	Mesin Absensi	2	-	-	2
16	Alat Pemotong Kertas	1	-	-	1
17	Display	2	-	-	2
18	Alat kantor Lainnya	121	-	-	121
19	Meja Kayu / Rotan	18	-	2	20
20	Kursi Besi / Metal	6	-	-	6
21	Meja Rapat	1	-	-	1
22	Kursi Tamu	4	-	-	4
23	Kursi Tangan	-	-	-	-
24	Kursi Putar	10	3	5	18
25	Meja Komputer	6	-	-	6
26	Meja Biro	13	2	-	15
27	Sofa	4	-	-	4
28	Lemari Es	1	-	2	3
29	AC Unit	14	1	1	16
30	Kipas Angin	4	-	2	6
31	Televisi	10	-	5	15
32	Sound System	3	-	-	3
33	Wireless	2	-	-	2
34	Camera Film	2	-	-	2
35	Dispenser	3	1	2	6
36	PC Unit	23	2	5	30
37	Laptop	13	2		15
38	Note Book	2	-	-	2
39	Printer	19	-	4	23

Lembaga Formal dan Nonformal

No	Uraian	Jumlah
1.	PAUD sejenis	6 lembaga
2.	Tempat Penitipan Anak	3 lembaga
3.	Kelompok Bermain	45 lembaga
4.	TK	72 lembaga
5.	SD	168 lembaga
6.	SMP/MTs/LB	53 lembaga
7.	Kursus	48 lembaga
8.	PKBM	6 lembaga



2.3. Target Pencapaian Indikator Dinas Pendidikan

Target Pencapaian Indikator Dinas Pendidikan Kota Binjai dapat digambarkan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pendidikan Kota Binjai 2021-2025 sebagai berikut :

TABEL 2.3

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021-2025

Target	Progran/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar 2021	Target Capaian	Realisasi	Target Pencapaian	Realisasi	Target Pencapaian	Realisasi	Target Pencapaian	Target Pencapaian
					2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
1.4.1.(g)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	DINAS PENDIDIKAN	Persentase	88,24%	99.13%	92,47%	99.15%	92,47%	99.20%	92.86%	99.22%	99.25%
1.4.1.(h)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	DINAS PENDIDIKAN	Persentase	78,04%	84.60%	83,36%	84.65%	83.63%	84.70%	83.70%	84.75%	84.80%
TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS												
TARGET 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada pencapaian pembelajaran yang relevan dan efektif												
4.1.1.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/Kelas 6, c. tingkat akhir SMP/Kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam : (i) membaca, (ii) matematika											
	penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Dinas Pendidikan	Persentase	100%	99.70%	100%	99.80%	100%	99.90%	100%	99.95%	100%

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

4.1.1.(a).	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 5, (b) kelas 8, c. usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam : (i) membaca, (ii) matematika											
	penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Dinas Pendidikan	Persentase	100%	99.7	100%	99.8	100%	99.9	100%	99.95	100%
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat											
	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Dinas Pendidikan	Persentase	100%	99.82%	100%	99.84%	100%	99.86%	100%	99.88%	99.90%
	Angka melanjutkan dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan	Persentase	100%	99.66%	100%	99.68%	100%	99.70%	100%	99.72%	99.74%
4.1.2 (a)	angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat											
	Angka putus sekolah SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan	Persentase	0,1%	0.0023	0,1%	0.0022	0%	0.0021	0%	0.002	0.0019
	Angka putus sekolah SMP/MTs/paket B	Dinas Pendidikan	Persentase	0,1%	0,1%	0%	0.05%	0%	0.0025	0%	0.0015	0.0003
TARGET 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar												
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut jenis kelamin											
	persentase pendidikan anak usia dini (PAUD)	Dinas Pendidikan	Persentase	100%	28.55%	14.12%	31.41%	67%	34.55%	59%	38%	41.80%

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

TARGET 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

4.5.1*	Rasio angka partisipasi murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) rasio angka partisipasi kasar (APK) pada tingkat SMP/ Sederajat, SMA/SMK/ Sederajat, dan perguruan tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, c. kuintil terbawah/teratas, d. disabilitas/tanpa disabilitas											
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan	Persentase	88,24%	99.13%	92,47%	99.15%	100.00%	99.20%	100.00%	99.22%	99.25%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Dinas Pendidikan	Persentase	78,04%	84.60%	83,36%	84.65%	80.97%	84.70%	83.70%	84.75%	84.80%

TARGET 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki/perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi

4.6.1.	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung menurut jenis kelamin											
	Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Dinas Pendidikan	Persentase	100%	99.70%	100%	99.80%	100%	99.90%	100%	99.95%	100%
4.6.1. (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur \geq tahun											
	Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Dinas Pendidikan	Persentase	100%	99.70%	100%	99.80%	100%	99.90%	100%	99.95%	100%

TARGET 4.7. Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

4.7.1	pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, c. pendidikan guru, d. penilaian siswa											
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Dinas Pendidikan	Persentase	100%	3.53%	100.00%	3.54%	100.00%	3.54%	100.00%	3.54%	3.55%
	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Dinas Pendidikan	Persentase	100%	84.27%	100.00%	85.15%	100.00%	86.60%	100.00%	87.70%	88.07%
TARGET 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang terutama negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil												
4.c.1*	persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan											
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Dinas Pendidikan	Persentase	100%	3.53%	100.00%	3.54%	100.00%	3.54%	100.00%	3.54%	3.55%

Realisasi capaian indikator **Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat** Tahun 2024 mencapai 92.86% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 99.2% dimana perbandingan antara target dan realisasi mengalami penurunan sebesar 6.34%. Sedangkan untuk realisasi capaian indikator **Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat** Tahun 2024 juga mengalami penurunan yaitu mencapai 83.7% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 84.7% dimana perbandingan antara target dan realisasi mengalami penurunan sebesar 1%.

Realisasi capaian indikator **penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)** Tahun 2024 mencapai 100% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 99.90% dimana perbandingan antara target dan realisasi mengalami kenaikan sebesar 0.1%.

Realisasi capaian indikator **Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs** Tahun 2024 mencapai 100% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 99.86% dimana perbandingan antara target dan realisasi mengalami kenaikan sebesar 0.14%. Sedangkan untuk realisasi capaian indikator **Angka melanjutkan dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA** Tahun 2024 juga mengalami kenaikan yaitu mencapai 100% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 99.70% dimana perbandingan antara target dan realisasi mengalami kenaikan sebesar 0.3%.

Realisasi capaian indikator **Angka putus sekolah SD/MI/Paket A** Tahun 2024 mencapai 0% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 0.0021% dimana perbandingan antara target dan realisasi mengalami kenaikan sebesar -0.0021%. Sedangkan untuk realisasi capaian indikator **Angka putus sekolah SMP/MTs/paket B** Tahun 2024 juga mengalami kenaikan yaitu mencapai 0% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 0.0025% dimana perbandingan antara target dan realisasi mengalami kenaikan sebesar - 0.0025%.

Realisasi capaian indikator **persentase pendidikan anak usia dini (PAUD)** Tahun 2024 mencapai 59% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 34.55% dimana perbandingan antara target dan realisasi mengalami kenaikan sebesar 24.45%.

Realisasi capaian indikator **Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV** Tahun 2024 mencapai 100% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 3.54% dimana perbandingan antara target dan realisasi mengalami kenaikan sebesar 96.46%. Sedangkan untuk realisasi capaian indikator **Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik** Tahun 2024 juga mengalami kenaikan yaitu mencapai 100% dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 86.60% dimana perbandingan antara target dan realisasi mengalami kenaikan sebesar 13.40%.

**PROGRA KEGIATAN
INDIKATOR DAN
PENDANAAN DINAS
PENDIDIKAN KOTA
BINJAI**

Target	Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Target Tahunan	Target Tahunan	Indikatif Alokasi anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026						
TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS														
TARGET 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada pencapaian pembelajaran yang relevan dan efektif														
Indikator SDGs 4.1.1. : Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/Kelas 6, c. tingkat akhir SMP/Kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam : (i) membaca, (ii) matematika														
Indikator RPJMD : penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)														
Program	Program Pengelolaan Pendidikan	Pagu	92,224,332,905	82,382,831,210	96,477,949,345	85,678,144,458	65,258,061,826	89,105,270,237	76,392,396,350	92,669,481,046	96,376,260,288	446,211,987,239	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
Kegiatan	Pengelolan Pendidikan Sekolah Dasar	Pagu	55,973,305,000	45,347,483,970	68,466,945,586	47,161,383,329	45,053,397,500	49,047,838,662	58,904,442,250	51,009,752,208	53,050,142,297	245,616,600,466	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pagu	31,425,422,090	31,134,547,240	23,308,192,980	32,379,929,130	15,485,776,526	33,675,126,295	12,493,061,700	35,022,131,347	36,423,016,600	168,634,750,611	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pagu	1,750,448,645	2,224,800,000	1,582,095,508	2,313,792,000	1,840,218,000	2,406,343,680	2,012,297,600	2,502,597,427	2,602,701,324	12,050,234,431	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
Indikator SDGs 4.1.1.(a) : Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 5, (b) kelas 8, c. usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam : (i) membaca, (ii) matematika														

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Indikator RPJMD : penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)														
Program	Program Pengelolaan Pendidikan	Pagu	92,224,332,905	82,382,831,210	96,477,949,345	85,678,144,458	65,258,061,826	89,105,270,237	76,392,396,350	92,669,481,046	96,376,260,288	446,211,987,239	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pagu	55,973,305,000	45,347,483,970	68,466,945,586	47,161,383,329	45,053,397,500	49,047,838,662	58,904,442,250	51,009,752,208	53,050,142,297	245,616,600,466	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pagu	31,425,422,090	31,134,547,240	23,308,192,980	32,379,929,130	15,485,776,526	33,675,126,295	12,493,061,700	35,022,131,347	36,423,016,600	168,634,750,611	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pagu	1,750,448,645	2,224,800,000	1,582,095,508	2,313,792,000	1,840,218,000	2,406,343,680	2,012,297,600	2,502,597,427	2,602,701,324	12,050,234,431	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
Indikator SDGs 4.1.2* : Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat														
Indikator RPJMD : Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs														
Indikator RPJMD : Angka melanjutkan dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA														
Program	Program Pengelolaan Pendidikan	Pagu	92,224,332,905	82,382,831,210	96,477,949,345	85,678,144,458	65,258,061,826	89,105,270,237	76,392,396,350	92,669,481,046	96,376,260,288	446,211,987,239	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pagu	31,425,422,090	31,134,547,240	23,308,192,980	32,379,929,130	15,485,776,526	33,675,126,295	12,493,061,700	35,022,131,347	36,423,016,600	168,634,750,611	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
Indikator SDGs 4.1.2 (a) : angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat														
Indikator RPJMD : Angka putus sekolah SD/MI/Paket A														
Indikator RPJMD : Angka putus sekolah SMP/MTs/paket B														
Program	Program Pengelolaan Pendidikan	Pagu	92,224,332,905	82,382,831,210	96,477,949,345	85,678,144,458	65,258,061,826	89,105,270,237	76,392,396,350	92,669,481,046	96,376,260,288	446,211,987,239	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pagu	55,973,305,000	45,347,483,970	68,466,945,586	47,161,383,329	45,053,397,500	49,047,838,662	58,904,442,250	51,009,752,208	53,050,142,297	245,616,600,466	DAU/DAK	Dinas Pendidikan

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

TARGET 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar														
Indikator SDGs 4.2.2* : Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut jenis kelamin														
Indikator RPJMD : persentase pendidikan anak usia dini (PAUD)														
Program	Program Pengelolaan Pendidikan	Pagu	92,224,332,905	82,382,831,210	96,477,949,345	85,678,144,458	65,258,061,826	89,105,270,237	76,392,396,350	92,669,481,046	96,376,260,288	446,211,987,239	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pagu	3,075,157,170	3,676,000,000	3,120,715,271	3,823,040,000	2,878,669,800	5,884,000,000	2,982,594,800	4,135,000,064	4,300,400,067	19,910,401,731	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
TARGET 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.														
Indikator SDGs 4.5.1* : Rasio angka partisipasi murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) rasio angka partisipasi kasar (APK) pada tingkat SMP/ Sederajat, SMA/ SMK/ Sederajat, dan perguruan tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, c. kuintil terbawah/ teratas, d. disabilitas/ tanpa disabilitas														
Indikator RPJMD : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A														
Indikator RPJMD : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B														
Indikator RPJMD : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A														
Indikator RPJMD : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B														
Program	Program Pengelolaan Pendidikan	Pagu	92,224,332,905	82,382,831,210	96,477,949,345	85,678,144,458	65,258,061,826	89,105,270,237	76,392,396,350	92,669,481,046	96,376,260,288	446,211,987,239	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
Kegiatan	Pengelolan Pendidikan Sekolah Dasar	Pagu	55,973,305,000	45,347,483,970	68,466,945,586	47,161,383,329	45,053,397,500	49,047,838,662	58,904,442,250	51,009,752,208	53,050,142,297	245,616,600,466	DAU/DAK	Dinas Pendidikan

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

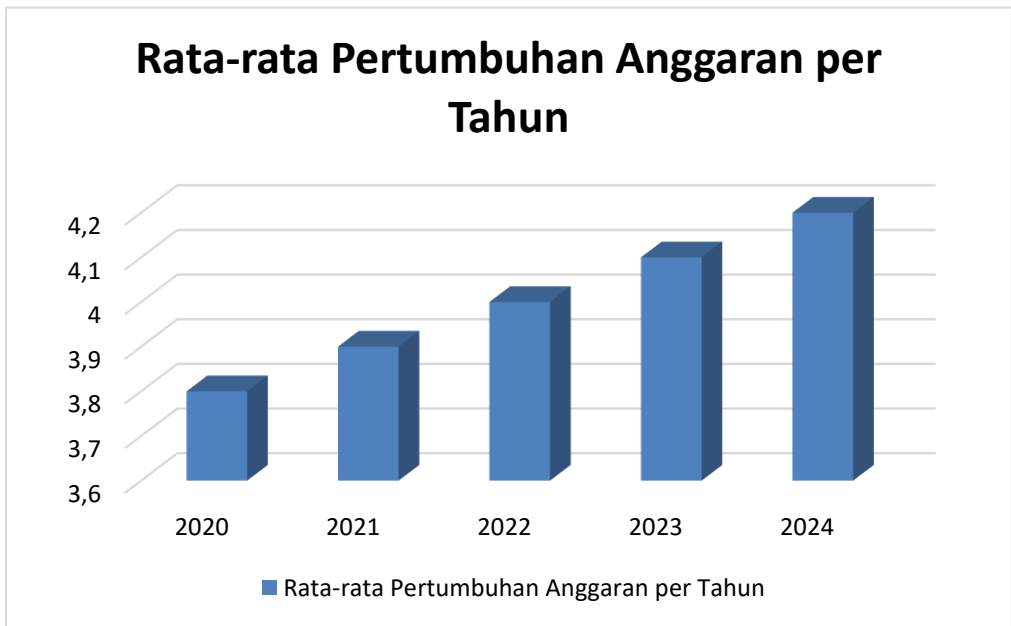
TARGET 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki/perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi														
Indikator SDGs 4.6.1. : Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung menurut jenis kelamin														
Indikator RPJMD : Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)														
Program	Program Pengelolaan Pendidikan	Pagu	92,224,332,905	82,382,831,210	96,477,949,345	85,678,144,458	65,258,061,826	89,105,270,237	76,392,396,350	92,669,481,046	96,376,260,288	446,211,987,239	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
Kegiatan	Pengelolan Pendidikan Sekolah Dasar	Pagu	55,973,305,000	45,347,483,970	68,466,945,586	47,161,383,329	45,053,397,500	49,047,838,662	58,904,442,250	51,009,752,208	53,050,142,297	245,616,600,466	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pagu	31,425,422,090	31,134,547,240	23,308,192,980	32,379,929,130	15,485,776,526	33,675,126,295	12,493,061,700	35,022,131,347	36,423,016,600	168,634,750,611	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pagu	1,750,448,645	2,224,800,000	1,582,095,508	2,313,792,000	1,840,218,000	2,406,343,680	2,012,297,600	2,502,597,427	2,602,701,324	12,050,234,431	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
Indikator SDGs 4.6.1. (a) : Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ tahun														
Indikator RPJMD : Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)														
Program	Program Pengelolaan Pendidikan	Pagu	92,224,332,905	82,382,831,210	96,477,949,345	85,678,144,458	65,258,061,826	89,105,270,237	76,392,396,350	92,669,481,046	96,376,260,288	446,211,987,239	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
Kegiatan	Pengelolan Pendidikan Sekolah Dasar	Pagu	55,973,305,000	45,347,483,970	68,466,945,586	47,161,383,329	45,053,397,500	49,047,838,662	58,904,442,250	51,009,752,208	53,050,142,297	245,616,600,466	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pagu	31,425,422,090	31,134,547,240	23,308,192,980	32,379,929,130	15,485,776,526	33,675,126,295	12,493,061,700	35,022,131,347	36,423,016,600	168,634,750,611	DAU/DAK	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pagu	1,750,448,645	2,224,800,000	1,582,095,508	2,313,792,000	1,840,218,000	2,406,343,680	2,012,297,600	2,502,597,427	2,602,701,324	12,050,234,431	DAU/DAK	Dinas Pendidikan

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

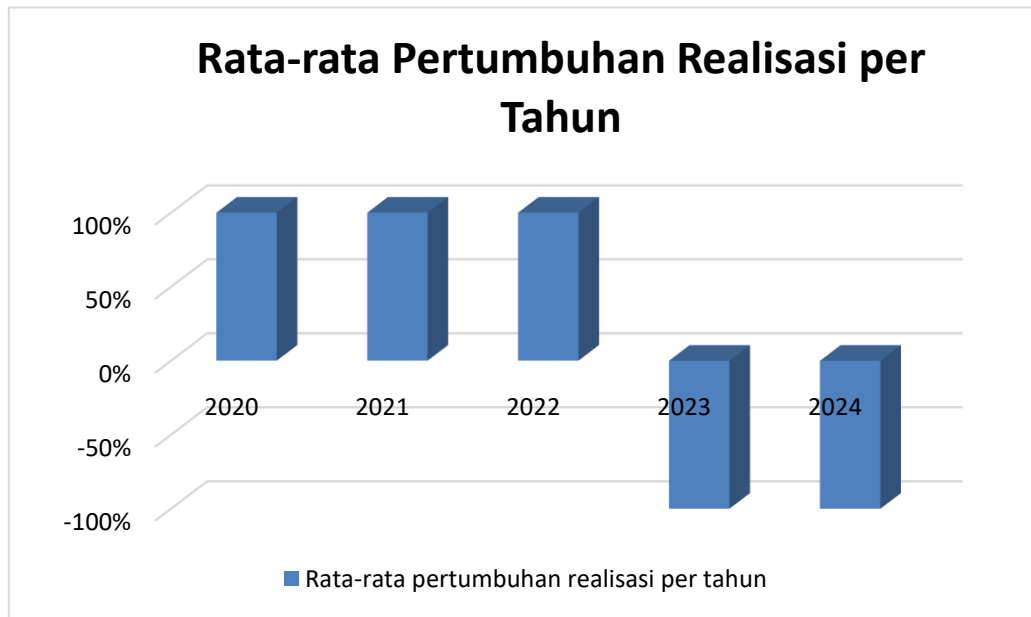
TARGET 4.7. Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan														
Indikator SDGs 4.7.1 : pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, c. pendidikan guru, d. penilaian siswa														
Indikator RPJMD : Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV														
Indikator RPJMD : Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik														
Program	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pagu	1,568,909,200	66,572,515,564	2,810,008,090	69,235,416,187	2,281,743,060	72,004,832,834	1,960,287,340	74,885,026,147	77,880,427,193	360,578,217,925	DAU	Dinas Pendidikan
Kegiatan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pagu	1,568,909,200	66,572,515,564	2,810,008,090	69,235,416,187	2,281,743,060	72,004,832,834	1,960,287,340	74,885,026,147	77,880,427,193	360,578,217,925	DAU	Dinas Pendidikan

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

TARGET 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang terutama negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil														
Indikator SDGs 4.c.1* : persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan														
Indikator RPJMD : Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV														
Program	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pagu	1,568,909,200	66,572,515,564	2,810,008,090	69,235,416,187	2,281,743,060	72,004,832,834	1,960,287,340	74,885,026,147	77,880,427,193	360,578,217,925	DAU	Dinas Pendidikan
Kegiatan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pagu	1,568,909,200	66,572,515,564	2,810,008,090	69,235,416,187	2,281,743,060	72,004,832,834	1,960,287,340	74,885,026,147	77,880,427,193	360,578,217,925	DAU	Dinas Pendidikan



Tahun Anggaran	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Pertumbuhan	3.8%	3.9%	4%	4.1%	4.2%



Tahun Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Pertumbuhan	31%	23%	29%	-18%	-16%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Binjai memiliki faktor- faktor yang yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi penghambat. Hal-hal yang dianalisis menyangkut faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan program Dinas Pendidikan Kota Binjai :

1. Tantangan

Pengembangan pendidikan 5 (lima) tahun ke depan memiliki sejumlah kendala seperti:

1. Masih rendahnya cakupan PAUD dan PNF (Pendidikan Non Formal)
2. Kualitas guru dan mutu pendidikan yang masih kurang
3. Masih rendahnya pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai nasionalisme guna menjawab tantangan jaman di era globalisasi dan informasi dan teknologi (IT)

2. Peluang

Sedangkan faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan pendidikan
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendukung pelaksanaan pengembangan program Dinas Pendidikan
3. Beragamnya tingkat pengetahuan pada masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir pada masyarakat tersebut sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan pada masyarakat

3. Kekuatan

Untuk faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi kekuatan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan anggaran yang disediakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kota Binjai serta adanya kegiatan Dana BOS dan Dana DAK membuat jangkauan pelayanan pendidikan yang murah dapat dilaksanakan
2. Posisi dan peran pendidikan sebagai salah satu upaya ampuh dalam pembentukan watak disiplin, produktivitas, prestasi, budaya kerja dan

kepribadian bangsa

3. Keanekaragaman dan kekayaan budaya lokal menjadi modal untuk kemajuan program pendidikan

4. Kelemahan

Sedangkan faktor penghambat yang dapat menjadi kelemahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum meratanya kualitas mutu pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal
2. Belum memadainya kualitas fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan standar
3. Rendahnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi
4. Masih kurangnya pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan
5. Kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Binjai tidak terlepas dari berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Maka Pada bab III ini akan dikemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas pendidikan, telaahan visi, misi dan isu-isu strategis dalam pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Adapun bentuk permasalahan-permasalahan yang terjadi pada urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

Kurangnya kesadaran masyarakat yang menyadari bahwa pendidikan sangatlah penting terutama bagi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dan masyarakat yang tinggal didaerah terpencil. Masyarakat kurang menyadari bahwa pendidikan anak-anak sangatlah penting terutama bagi masa depan mereka.

2. Kurangnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;

Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bisa dikarenakan beberapa faktor antara lain:

- a. Kualifikasi guru yang belum setara sarjana sehingga berdampak pada menurunnya standar keilmuan yang berlaku
- b. Program Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru yang rendah sehingga banyak guru enggan untuk mengembangkan diri, seperti melakukan penelitian untuk menambah pengetahuan dan kompetensi dalam mengajar
- c. Ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang ajar

3. Belum dilakukannya pemetaan dan pemerataan guru;

Belum meratanya penyebaran guru di daerah-daerah terutama di daerah terpencil, karena selama ini konsentrasi guru lebih banyak terjadi di daerah kota sehingga mengakibatkan ketimpangan jumlah guru yang ada di daerah perkotaan yang berlebih dibanding dengan di daerah pedesaan yang kekurangan guru sehingga belum memenuhi standar kebutuhan guru.

4. Belum meratanya pendidikan dan pelatihan guru;

Pendidikan yang merata adalah pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis. Sedangkan kegiatan pelatihan bagi guru pada dasarnya merupakan suatu bagian dari manajemen dalam bidang ketenagaan di pendidikan dan merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru sehingga pada gilirannya diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat memberikan pelayanan bagi pendidikan dengan sebaik-baiknya.

5. Belum meratanya rasio guru kompetensi bidang studi;

Kompetensi adalah kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya yang meliputi tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu pengelolaan pembelajaran, pengembangan profesi, dan penguasaan akademik. Kompetensi pertama yang harus dimiliki seorang guru adalah penguasaan bahan bidang studi yaitu kemampuan mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan keahlian yang diajarkannya.

6. Masih perlunya peningkatan kualitas fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan standar;

Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

7. Belum optimalnya akses dan kualitas penyelenggaraan PAUD;

Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan PAUD harus diperhatikan dan berkesinambungan untuk menjaga kualitas pengajaran mengingat anak didik usia dini memiliki fase pertumbuhan dan perkembangan otak yang nantinya akan menentukan bagaimana mereka ke depannya. Sehingga diperlukannya optimalisasi akses dan kualitas penyelenggaraan PAUD yang dapat membantu meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD di masa depan.

8. Degradasi kultural di kalangan generasi muda;

Degradasi kultural pada kalangan generasi muda dapat diartikan sebagai bentuk dari adanya pemerosotan nilai-nilai kultural pada masyarakat . Peningkatan degradasi moral ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pergaulan bebas, pengaruh budaya barat, kurangnya pengawasan dan perhatian orangtua dan tingkat pendidikan yang rendah.

Penyimpulan Isu Strategis Dinas Pendidikan Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut :

Penyimpulan Isu Strategis Dinas Pendidikan Kota Binjai

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi bidang pendidikan di Kota Binjai yang menjadi kewenangan daerah meliputi pengelolaan sekolah, tenaga pendidik, kurikulum, dan fasilitas pendidikan. Kota Binjai juga memiliki potensi dalam pengembangan smart city yang dapat mendukung pendidikan melalui teknologi	<p>1.Kualitas guru menjadi salah satu tantangan umum dalam pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Binjai.</p> <p>2.Kurangnya fasilitas pendidikan, seperti infrastruktur sekolah yang memadai, juga menjadi masalah.</p> <p>3.Keterbatasan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, masih menjadi tantangan.</p> <p>4.Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja dapat menjadi masalah bagi siswa.</p> <p>5.Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta, juga perlu diatasi.</p> <p>6.Kemiskinan dan faktor sosial lainnya dapat menyebabkan siswa putus sekolah.</p>	Secara umum, permasalahan pendidikan di Kota Binjai mencerminkan tantangan yang lebih luas di bidang pendidikan Indonesia, yang membutuhkan solusi komprehensif dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat.	Isu global di bidang pendidikan mencakup berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses pendidikan, kualitas pendidikan yang tidak merata, relevansi kurikulum, dan dampak globalisasi. Tantangan lain termasuk perubahan dalam pola belajar, penggunaan teknologi, dan pengembangan keterampilan guru. Selain itu, isu global juga melibatkan isu-isu seperti literasi, kekerasan di sekolah, dan kesejahteraan guru.	Isu nasional di bidang pendidikan di Indonesia meliputi akses terbatas, ketimpangan, kualitas guru, relevansi kurikulum, dan infrastruktur. Selain itu, kesenjangan digital dan kualitas ujian juga menjadi perhatian. Permasalahan ini berdampak pada pemerataan pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing bangsa.	Isu regional di bidang pendidikan meliputi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kekurangan guru berkualitas di daerah terpencil, kemiskinan dan rendahnya latar belakang pendidikan orang tua, serta fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang kurang memadai.	Isu strategis di bidang pendidikan meliputi akses, kualitas, pemerataan, relevansi kurikulum, kesejahteraan guru, angka putus sekolah, dan kualitas SDM. Isu-isu ini penting untuk diatasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Kesimpulan Isu Strategis :

1. Kualitas guru menjadi salah satu tantangan umum dalam pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Binjai;

Beberapa faktor yang menyebabkan kualitas guru menjadi tantangan adalah:

Keterbatasan Pelatihan dan Pengembangan Profesional:

Banyak guru yang kurang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang relevan dengan perkembangan kurikulum dan metode pengajaran terbaru.

Penguasaan Materi dan Pedagogi:

Beberapa guru mungkin masih mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran dan menerapkan metode pengajaran yang efektif.

Kesejahteraan Guru:

Kesejahteraan guru, termasuk gaji yang layak, juga berperan penting dalam memotivasi guru untuk memberikan yang terbaik dalam mengajar.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana:

Keterbatasan fasilitas dan teknologi di sekolah juga dapat menjadi kendala bagi guru dalam melaksanakan tugasnya.

Tantangan dalam Pembelajaran Abad 21:

Guru dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menguasai teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran yang relevan dengan generasi saat ini.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru menjadi krusial untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, sekolah, dan guru itu sendiri untuk memastikan guru memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan mendapatkan dukungan yang memadai.

2. Kurangnya fasilitas pendidikan, seperti infrastruktur sekolah yang memadai, juga menjadi masalah;

Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan masalah ini:

Dampak pada Proses Belajar Mengajar:

Sekolah dengan fasilitas yang kurang memadai, seperti ruang kelas yang tidak layak, kurangnya laboratorium, perpustakaan, atau akses internet, dapat menghambat siswa dalam belajar secara optimal.

Ketidaksetaraan Pendidikan:

Ketidaktersediaan fasilitas yang memadai seringkali lebih parah terjadi di daerah terpencil atau kurang berkembang, memperdalam kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dampak pada Prestasi Siswa:

Siswa yang belajar di lingkungan yang tidak kondusif cenderung mengalami kesulitan belajar dan mencapai potensi akademik mereka, yang dapat berdampak pada prestasi mereka dalam ujian dan tingkat literasi secara keseluruhan.

Tantangan dalam Era Digital:

Di era digital saat ini, kurangnya akses ke teknologi dan internet di sekolah-sekolah juga menjadi masalah yang signifikan, menghambat siswa dan guru dalam mengikuti perkembangan pendidikan.

Solusi Multifaset:

Mengatasi masalah ini membutuhkan solusi yang komprehensif, termasuk peningkatan investasi dalam pendidikan, pemberdayaan masyarakat setempat, dan pemanfaatan teknologi pendidikan.

Penting untuk diingat bahwa pendidikan yang berkualitas membutuhkan lingkungan belajar yang kondusif dan fasilitas yang memadai. Tanpa hal ini, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan akan terhambat, dan kesenjangan pendidikan akan terus berlanjut.

42

3. Keterbatasan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, masih menjadi tantangan;

Berikut beberapa poin yang memperjelas tantangan tersebut:

Faktor Ekonomi:

Keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu seringkali tidak dapat memenuhi biaya pendidikan seperti seragam, buku, alat tulis, dan transportasi ke sekolah. Akibatnya, banyak anak terpaksa putus sekolah untuk membantu mencari nafkah atau karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan.

Akses Terbatas:

Di daerah terpencil atau pedesaan, akses ke sekolah seringkali sulit dijangkau. Jarak yang jauh, kondisi jalan yang buruk, dan kurangnya transportasi umum menjadi kendala besar bagi anak-anak untuk bersekolah.

Kualitas Pendidikan:

Selain akses, kualitas pendidikan juga menjadi perhatian. Banyak sekolah di daerah kurang mampu memiliki fasilitas yang minim, tenaga pengajar yang kurang berkualitas, dan kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan.

Faktor Sosial dan Budaya:

Selain faktor ekonomi dan akses, faktor sosial dan budaya juga berperan. Di beberapa daerah, ada pandangan bahwa pendidikan anak perempuan tidak terlalu penting atau ada tradisi yang menghalangi anak-anak untuk bersekolah.

Oleh karena itu, mengatasi keterbatasan akses pendidikan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain:

Penyediaan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan:

Memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat meringankan beban ekonomi mereka dan memungkinkan mereka untuk terus bersekolah.

Peningkatan Infrastruktur Pendidikan:

Membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah terpencil, serta menyediakan transportasi yang memadai, akan memudahkan anak-anak untuk menjangkau sekolah.

Peningkatan Kualitas Guru:

Melatih dan meningkatkan kualitas guru di daerah terpencil akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Kampanye Kesadaran Pendidikan:

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, terutama bagi anak perempuan, akan membantu mengubah pandangan masyarakat dan meningkatkan partisipasi pendidikan.

Pemanfaatan Teknologi:

Memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh dan menyediakan akses ke materi pembelajaran online dapat membantu mengatasi keterbatasan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, diharapkan setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosialnya, dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan berhak atas masa depan yang lebih baik.

4. Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja dapat menjadi masalah bagi siswa;

Berikut adalah beberapa masalah yang mungkin timbul:

Kesulitan Mendapatkan Pekerjaan:

Jika kurikulum tidak membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan setelah lulus. Keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi menjadi semakin penting di era globalisasi.

Kurangnya Motivasi Belajar:

Kurikulum yang tidak menarik atau tidak relevan dengan minat siswa dapat menyebabkan mereka kehilangan motivasi untuk belajar. Materi yang diajarkan mungkin terasa membosankan atau tidak berguna bagi mereka.

Kesenjangan Keterampilan:

Kurikulum yang terlalu fokus pada hafalan dan kurang menekankan pada keterampilan praktis dapat menciptakan kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Siswa mungkin tidak siap menghadapi tantangan nyata di tempat kerja.

Kurangnya Pengembangan Diri:

Jika kurikulum tidak memungkinkan siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, mereka mungkin tidak dapat mencapai potensi penuh mereka. Siswa perlu memiliki ruang untuk mengeksplorasi minat mereka dan mengembangkan keterampilan yang unik.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan siswa. Kurikulum yang baik harus berfokus pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka.

5. Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta, juga perlu diatasi;

Kesenjangan Pendidikan: Kota vs. Desa dan Negeri vs. Swasta

Perkotaan vs. Pedesaan:

Sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik, seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi, dibandingkan dengan sekolah di daerah pedesaan. Selain itu, kualitas guru dan akses pelatihan juga cenderung lebih baik di perkotaan.

Negeri vs. Swasta:

Sekolah negeri seringkali menghadapi keterbatasan anggaran dan fasilitas dibandingkan dengan sekolah swasta yang memiliki sumber pendanaan lebih beragam. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pendidikan dan akses siswa terhadap sumber daya pendidikan.

Penyebab Kesenjangan:

Infrastruktur:

Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di daerah terpencil dan sekolah negeri menjadi kendala utama.

Kualitas Guru:

Kualitas guru, termasuk pelatihan dan insentif, tidak merata antara perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta.

Akses Teknologi:

Keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah terpencil dan sekolah negeri menghambat proses pembelajaran.

Distribusi Guru:

Pemerataan distribusi guru yang berkualitas juga menjadi masalah, dengan kecenderungan guru lebih memilih mengajar di perkotaan atau sekolah swasta.

Solusi Mengatasi Kesenjangan:

Peningkatan Infrastruktur:

Membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah terpencil dan sekolah negeri.

Pemerataan Guru:

Memberikan insentif dan pelatihan yang lebih baik bagi guru yang mengajar di daerah terpencil dan sekolah negeri.

Akses Teknologi:

Memastikan ketersediaan akses teknologi dan pelatihan penggunaan TIK di semua sekolah.

Beasiswa dan Bantuan Finansial:

Menyediakan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu di daerah terpencil dan sekolah negeri.

Kolaborasi:

Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan.

Pentingnya Mengatasi Kesenjangan:

Mengatasi kesenjangan pendidikan adalah langkah krusial untuk menciptakan keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan bagi semua anak, tanpa memandang lokasi geografis atau status sosial ekonomi. Pendidikan yang berkualitas akan memberdayakan individu dan berkontribusi pada pembangunan bangsa secara keseluruhan.

6. Kemiskinan dan faktor sosial lainnya dapat menyebabkan siswa putus sekolah;

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak putus sekolah:

Kemiskinan:

Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah seringkali tidak mampu membiayai pendidikan anak, termasuk biaya sekolah, buku, seragam, dan kebutuhan lainnya.

Kurangnya Perhatian Orang Tua:

Orang tua yang kurang memberikan perhatian dan dorongan terhadap pendidikan anak juga dapat menyebabkan anak kehilangan minat belajar dan akhirnya putus sekolah.

Lingkungan yang Tidak Mendukung:

Lingkungan sekitar yang tidak kondusif, seperti pergaulan yang buruk atau kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, juga dapat mempengaruhi keputusan anak untuk berhenti sekolah.

Kurangnya Motivasi Belajar:

Beberapa anak mungkin merasa tidak tertarik dengan pelajaran di sekolah atau merasa sekolah tidak relevan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka kehilangan motivasi untuk belajar dan akhirnya putus sekolah.

Faktor Kesehatan:

Masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, juga dapat menjadi penyebab anak putus sekolah. Jika seorang anak sakit dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, mereka mungkin tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah.

Perkawinan Usia Dini:

Beberapa anak, terutama anak perempuan, terpaksa menikah di usia muda karena berbagai faktor, termasuk tekanan sosial dan ekonomi, yang mengakibatkan mereka putus sekolah.

Perundungan:

Perundungan di sekolah dapat membuat anak merasa tidak aman dan tidak nyaman, sehingga mereka memilih untuk berhenti sekolah.

Penting untuk diingat bahwa putus sekolah memiliki dampak negatif yang luas, tidak hanya bagi individu anak, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Anak yang putus sekolah cenderung memiliki peluang kerja yang lebih rendah, berisiko lebih tinggi terlibat dalam kegiatan kriminal, dan dapat memperburuk siklus kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah anak putus sekolah dan memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak sangatlah penting.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Berikut tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kota Binjai di bawah ini yang telah disusun:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menciptakan SDM unggul	Meningkatnya intelektualitas dan karekter anak usia Sekolah	Meningkatnya kemampuan berproduksi masyarakat					
		Meningkatnya integritas individu					
Meningkatkan status gizi anak sekolah TK, SD, SMP		Meningkatnya asupan gizi anak sekolah,TK, SD dan SMP					
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.					

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah		1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasidalam Pendidikan Khusus (APS)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SD/MI/Paket A % 100 APK SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

					<p>APM SMP/MTs/Paket B% 100</p> <p>APK SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA</p> <p>Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf</p>	<p>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</p>	
					<p>Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p>	<p>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p>	
					<p>Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p>	<p>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p>	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan		Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Serifikat Pendidik	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah		Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan		Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

					Persentase kualitas pelayanan, efisiensi anggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
--	--	--	--	--	---	---	--

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Walikota dan Wakil Walikota 2025-2029 adalah:

“BINJAI MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Dari visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi sebagai berikut :

Maju :

mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan.

Sejahtera :

mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Berkelanjutan :

mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua..

Dengan melihat misi Walikota dan Wakil Walikota Binjai maka Dinas Pendidikan dalam renstra harus memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah.

Adapun program prioritas pendidikan untuk mewujudkan misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP,
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial Serta Pemberantasan Kemiskinan,
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan,
4. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kreatif.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Visi Misi Presiden RI

Visi Presiden RI 2024 – 2029

" Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 "

Tujuan utama Visi ini adalah mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis serta berdaulat melalui penguatan persatuan bangsa. Visi ini diwujudkan dalam delapan misi utama atau "Astacita," yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan untuk mengakomodasi perkembangan Indonesia secara inklusif.

1. **Memperkokoh Ideologi dan Hak Asasi Manusia:** Prabowo-Gibran menekankan pentingnya ideologi Pancasila sebagai fondasi utama negara, yang akan diiringi dengan demokrasi kuat dan penegakan hak asasi manusia sebagai pilar harmoni nasional.
2. **Kemandirian Nasional di Berbagai Sektor:** Astacita kedua adalah membangun kemandirian nasional melalui swasembada di bidang pangan, energi, dan air, serta mengembangkan ekonomi kreatif, hijau, dan biru. Prabowo-Gibran bertekad meningkatkan ketahanan nasional di sektor-sektor strategis ini demi kemakmuran berkelanjutan.
3. **Penciptaan Lapangan Kerja dan Kewirausahaan:** Misi ketiga menargetkan peningkatan lapangan kerja berkualitas serta pengembangan industri kreatif dan kewirausahaan, termasuk melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
4. **Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM):** Pengembangan SDM menjadi salah satu fokus utama melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sains serta penegakan kesetaraan gender. Prabowo-Gibran juga menargetkan pemberdayaan pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas.
5. **Hilirisasi dan Industrialisasi:** Program hilirisasi industri ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mengoptimalkan hasil sumber daya nasional.

6. **Pengembangan Desa dan Pengentasan Kemiskinan:** Misi keenam menekankan pentingnya membangun dari desa dan memastikan pemerataan ekonomi, dengan upaya langsung untuk mengurangi kemiskinan melalui pengembangan ekonomi pedesaan.
7. **Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi:** Prabowo-Gibran mengutamakan reformasi birokrasi dan politik untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan anti-korupsi, serta upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
8. **Harmoni Lingkungan dan Budaya:** Misi terakhir bertujuan memperkuat toleransi antar-umat beragama dan menjaga hubungan harmonis dengan alam serta budaya. Upaya ini diharapkan mampu membangun Indonesia yang sejahtera dan berbudaya.

Astacita ini merupakan cetak biru program Prabowo-Gibran yang berkomitmen untuk membawa perubahan mendasar di berbagai sektor demi Indonesia yang lebih maju dan inklusif

8 Program Prioritas Prabowo Gibran

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menyiapkan delapan program prioritas sebagai bagian dari visi mereka untuk "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Program-program ini bertujuan memperkuat pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Indonesia. Berikut delapan program utama antara lain :

1. **Gizi dan Kesehatan untuk Anak dan Ibu Hamil:** Prabowo-Gibran berkomitmen menyediakan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil, guna mendukung kesehatan generasi mendatang.
2. **Layanan Kesehatan Gratis dan Pengembangan Rumah Sakit:** Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit berkualitas di tingkat kabupaten untuk memastikan akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat di seluruh wilayah.
3. **Peningkatan Produktivitas Pertanian:** Pembangunan lumbung pangan di desa dan daerah serta peningkatan lahan pertanian menjadi prioritas untuk mencapai swasembada pangan nasional.
4. **Sekolah Unggulan Terintegrasi:** Prabowo-Gibran berencana membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten dengan infrastruktur lengkap serta meningkatkan fasilitas sekolah yang membutuhkan renovasi, guna meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

5. **Program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha:** Mereka akan melanjutkan dan memperluas kartu kesejahteraan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta menambahkan program baru seperti Kartu Anak Sehat dan Kredit Usaha untuk mendukung usaha kecil dan ekonomi masyarakat.
6. **Kenaikan Gaji untuk ASN dan Pejabat Negara:** Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mereka akan menaikkan gaji ASN, terutama guru, tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara secara bertahap.
7. **Pembangunan Infrastruktur Desa dan Rumah Murah:** Program ini menargetkan pembangunan rumah murah bersanitasi baik dan peningkatan infrastruktur desa, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
8. **Pendirian Badan Penerimaan Negara:** Prabowo-Gibran berencana mendirikan Badan Penerimaan Negara yang akan difokuskan untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 23%, mendukung keberlanjutan ekonomi dan penguatan fiskal

Tantangan dan Harapan

Dalam menjalankan delapan program prioritas Prabowo-Gibran untuk mencapai "Indonesia Emas 2045," ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, serta harapan besar yang mereka ingin wujudkan.

Tantangan

1. **Ketahanan Pangan dan Energi:** Untuk mencapai ketahanan pangan nasional melalui peningkatan lahan pertanian dan pembangunan lumbung pangan, tantangan terbesar adalah keberlanjutan sumber daya alam dan pengelolaan lahan. Perlu strategi cermat untuk mengatasi deforestasi, degradasi lahan, dan ketergantungan pada impor pangan di tengah perubahan iklim.
2. **Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang Merata:** Membangun sekolah unggulan dan menyediakan layanan kesehatan gratis di seluruh daerah membutuhkan alokasi anggaran besar dan sumber daya manusia yang mumpuni. Kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah terpencil, serta kendala geografis, juga menjadi hambatan untuk memastikan pemerataan kualitas layanan.

3. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** Meski program kartu usaha dan kesejahteraan dapat membantu masyarakat di lapisan terbawah, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa dukungan ini berkelanjutan dan tidak sekadar menjadi bantuan sementara. Pemberdayaan yang efektif membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta program edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil.
4. **Reformasi Birokrasi:** Tantangan dalam meningkatkan efisiensi birokrasi terutama terkait dengan reformasi struktural dan perubahan budaya kerja. Perlu upaya serius dalam pemberantasan korupsi dan membangun sistem yang transparan untuk mendorong akuntabilitas di sektor publik.
5. **Pendanaan dan Penerimaan Negara:** Untuk mendukung Badan Penerimaan Negara yang akan meningkatkan rasio penerimaan terhadap PDB, Prabowo-Gibran perlu menghadapi tantangan dari segi regulasi dan tata kelola penerimaan pajak. Integrasi teknologi dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk mengurangi kebocoran pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Harapan ke Depan

Prabowo-Gibran memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global pada 2045, yang dikenal sebagai "Indonesia Emas 2045." Melalui delapan program prioritasnya, mereka berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup generasi muda, mencapai ketahanan pangan dan energi, serta memastikan pemerintahan yang transparan dan efektif. Di sisi global, mereka bercita-cita agar Indonesia memiliki posisi yang kuat dan dihormati dalam isu-isu internasional.

Harapan Prabowo-Gibran mencakup keberhasilan membangun fondasi kokoh bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih merata. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia di seluruh wilayah, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, serta menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peran aktif di kancah global. Melalui kerja keras dan kolaborasi, mereka berupaya membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan bermartabat bagi seluruh rakyatnya, antaranya :

1. **Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi:** Dengan program yang terfokus pada pembangunan ekonomi daerah, Prabowo-Gibran berharap dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa, mereka ingin menciptakan kesempatan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.
2. **Peningkatan Kesejahteraan Generasi Muda:** Prabowo-Gibran berkomitmen menyediakan rumah murah bersanitasi bagi generasi muda serta mendukung kewirausahaan. Harapan mereka adalah generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi sekaligus mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.
3. **Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berbasis Lingkungan:** Dalam upaya mencapai Indonesia Emas, Prabowo-Gibran ingin memastikan bahwa pembangunan yang mereka lakukan selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Ini meliputi peningkatan ketahanan pangan, energi terbarukan, dan perlindungan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.
4. **Sistem Pemerintahan yang Efisien dan Akuntabel:** Dengan reformasi birokrasi, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, cepat, dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan publik. Harapan ini didorong oleh misi mereka untuk meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik dan memastikan bahwa pemerintah melayani kepentingan rakyat.
5. **Indonesia sebagai Pemain Global:** Harapan besar Prabowo-Gibran adalah menjadikan Indonesia sebagai kekuatan yang dihormati di panggung internasional. Dengan diplomasi aktif dan kebijakan dalam negeri yang kuat, mereka ingin membawa Indonesia berperan lebih besar dalam isu-isu global, termasuk lingkungan dan perdamaian, menuju cita-cita Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Melalui visi besar ini, Prabowo-Gibran berharap mampu membangun Indonesia yang tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga adil, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

3.3.2. Visi Misi Gubernur Provinsi Sumatera Utara

Visi Gubernur Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2030

Visi

"Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan"

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan
5. Memperkuat ketahanan sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh

Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai visi dan misi tersebut:

Visi:

"Kolaborasi SUMUT Berkah"

menekankan pentingnya kerjasama dan sinergi antar berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk mewujudkan Sumatera Utara yang lebih baik.

"Unggul"

mengindikasikan bahwa Sumatera Utara bercita-cita menjadi daerah yang memiliki keunggulan kompetitif di berbagai bidang.

"Maju"

menunjukkan bahwa Sumatera Utara berorientasi pada pembangunan yang progresif dan dinamis.

"Berkelanjutan"

menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Misi:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

Ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat Sumatera Utara agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan.

2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah:

Misi ini bertujuan untuk menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan kondusif, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan:

Ini mencakup peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan:

Misi ini bertujuan untuk membangun infrastruktur yang memadai, indah, dan ramah lingkungan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Memperkuat ketahanan sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat SUMUT yang tangguh:

Misi ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya yang positif, serta membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, dan rencana struktur serta pola ruang wilayah Kota Binjai. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penataan ruang kota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Isi Pokok RTRW Kota Binjai:

Tujuan: Menetapkan arah pembangunan kota yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Kebijakan: Merupakan arahan umum yang menjadi dasar pelaksanaan penataan ruang.

Strategi: Merupakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan dan kebijakan.

Struktur Ruang: Rencana tata letak kawasan-kawasan utama di kota, seperti pusat kota, kawasan industri, dan kawasan permukiman.

Pola Ruang: Rencana pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi kawasan, seperti kawasan pertanian, kawasan hijau, dan kawasan komersial.

Pentingnya RTRW Kota Binjai:

Pemandu Pembangunan:

RTRW menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan.

Pencegahan Konflik:

Menentukan fungsi dan pemanfaatan ruang yang jelas, sehingga meminimalkan potensi konflik antar pengguna ruang.

Peningkatan Kualitas Lingkungan:

Mengatur penggunaan lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kota.

Pengembangan Wilayah:

Memandu pengembangan wilayah kota yang terarah dan terpadu.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:

Dengan penataan ruang yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peran Dinas Terkait:

Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman Kota Binjai memiliki peran penting dalam penyusunan dan pelaksanaan RTRW. Dinas ini bertanggung jawab dalam: Menyusun rancangan RTRW, Melakukan evaluasi dan revisi RTRW secara berkala, Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW, Memberikan rekomendasi terkait perizinan pemanfaatan ruang, Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai RTRW.

Tantangan dalam Pelaksanaan RTRW:

Perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW, Pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat, Keterbatasan sumber daya, Peran serta masyarakat yang belum optimal.

Kesimpulan:

RTRW Kota Binjai adalah dokumen penting yang menjadi pedoman dalam penataan ruang kota. Dengan pelaksanaan RTRW yang baik, Kota Binjai diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkualitas, dan berwawasan lingkungan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Binjai adalah sebuah proses kajian yang dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Binjai mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. KLHS ini dilakukan sebelum adanya rencana pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari rencana tersebut dan mencari solusi untuk meminimalkan dampak negatif serta memaksimalkan manfaat lingkungan.

Pentingnya KLHS dalam Pembangunan Kota Binjai:

Mempertimbangkan Dampak Lingkungan:

KLHS membantu mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari berbagai rencana pembangunan, seperti perubahan tata ruang, pembangunan infrastruktur, atau kegiatan industri.

Mencari Solusi Berkelanjutan:

KLHS tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mencari solusi yang berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat lingkungan.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Hasil KLHS menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait pembangunan, memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak merusak lingkungan.

Keterlibatan Publik:

KLHS juga melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa kepentingan lingkungan dan masyarakat terakomodasi.

Proses KLHS di Kota Binjai:

1. Penyusunan RPJMD:

KLHS dilakukan sebagai bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai, yang mencakup berbagai sektor pembangunan.

2. Identifikasi Isu Lingkungan:

KLHS mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang relevan dengan rencana pembangunan, seperti ketersediaan air, kualitas udara, pengelolaan sampah, dan lain-lain.

3. Analisis Dampak:

KLHS menganalisis dampak lingkungan dari berbagai rencana pembangunan, baik dampak positif maupun negatif.

4. Penyusunan Alternatif:

KLHS mencari alternatif solusi untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat lingkungan.

5. Rekomendasi:

KLHS menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah daerah terkait kebijakan dan tindakan yang perlu diambil untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

6. Pemantauan dan Evaluasi:

Setelah rencana pembangunan dilaksanakan, KLHS juga melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Dengan adanya KLHS, Kota Binjai diharapkan dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Penentuan lokasi sarana dan prasarana pendidikan dilakukan melalui tahapan- tahapan sebagai berikut :

1. Mengirim surat ke kecamatan sebagai calon lokasi sarana dan prasarana pendidikan, di mana isi surat dimaksud agar pihak pemerintah kecamatan dapat memberikan gambaran dimana/lokasi sarana dan prasarana pendidikan dibangun serta menampung aspirasi dari masyarakat
2. Dinas Pendidikan bersama Bappeda melakukan kajian kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tersebut dan selanjutnya setelah disepakati Dinas Pendidikan mengirim surat ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperoleh izin

Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut sehingga apabila dibangun sarana dan prasarana pendidikan tidak merusak kawasan hutan lindung/cagar alam dan bangunan sarana dan prasarana pendidikan tersebut berdiri di atas lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis

Sinergitas dalam perencanaan peningkatan kualitas mutu pendidikan sangat diperlukan dalam menyelesaikan isu strategis yang saling terkait antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan memperhatikan telaah Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Binjai, Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis Kota Binjai, maka isu strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Binjai adalah: ***Peningkatan Pendidikan bermutu dan berkualitas yang berkebudayaan dan bernorma agama.***

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan

1. Tujuan :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Dinas Pendidikan Kota Binjai berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pemerintah Kota Binjai yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Tujuan pemerintah Kota yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Dinas Pendidikan

Kota Binjai adalah " pelayanan publik ". Berdasarkan pernyataan tujuan di atas serta pernyataan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota ditetapkanlah tujuan Dinas Pendidikan adalah "*Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia Sekolah*".

2. Sasaran :

Berdasarkan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran pembangunan pendidikan di Kota Binjai adalah Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

1. Meningkatkan kemampuan berproduksi masyarakat
2. Meningkatkan integritas individu
3. Meningkatkan asupan gizi anak sekolah,TK, SD dan SMP
4. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Binjai beserta indikator kinerja disampaikan dalam tabel berikut :

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Menciptakan SDM unggul	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia Sekolah	Meningkatnya kemampuan berproduksi masyarakat								
		Meningkatnya integritas individu								
Meningkatkan status gizi anak sekolah TK, SD, SMP		Meningkatnya asupan gizi anak sekolah, TK, SD dan SMP								
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.								
			1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasidalam Pendidikan Khusus (APS)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

			APM SD/MI/Paket A % 100 APK SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			APM SMP/MTs/Paket B% 100 APK SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetara an	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Serifikat Pendidik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

			Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Persentase kualitas pelayanan, efisiensi anggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Penentuan strategi dan arah kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Kota Binjai. Adapun strategi dan arah kebijakan tersebut yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Misi 1 :

Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP

Misi ini berkontribusi pada visi "Sejahtera" dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik, dan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak.

Strategi :

“Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM”

Arah Kebijakan :

- a. Perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar dan menengah secara gratis dan inklusif.
- b. Pengembangan kurikulum yang adaptif untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan keterampilan.
- c. Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- d. Perluasan pendidikan inklusif bagi kelompok miskin, rentan, dan penyandang disabilitas.

- e. Peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik guru
- f. Penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran kontekstual dan keteladanan.
- g. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru secara berkelanjutan.
- h. Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri dan dunia usaha.
- i. Peningkatan keterampilan usaha secara teknis dan manajerial

Strategi dan arah kebijakan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP	Perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar dan menengah secara gratis dan inklusif.	Peningkatan Akses Pendidikan / Sekolah Gratis SD dan SMP	
		Pengembangan kurikulum yang adaptif untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan keterampilan.	Pengembangan Kurikulum Pendidikan untuk peningkatan literasi dan numerasi siswa	
		Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.	Pemenuhan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan	
		Perluasan pendidikan inklusif bagi kelompok miskin, rentan, dan penyandang disabilitas.	Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi dari Masyarakat Miskin, Rentan dan Disabel	
		Peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik guru	Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidikan	
		Penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran kontekstual dan keteladanan.	Penguatan Pendidikan Karakter	
		Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru secara berkelanjutan.	Peningkatan Kesejahteraan Guru	
		Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri dan dunia usaha.	Sinergi Vokasi-USaha (Sivos) untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu	
		Peningkatan keterampilan usaha secara teknis dan manajerial	Peningkatan keterampilan wirausaha mandiri	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana program dan kegiatan SKPD

Program pembangunan pendidikan di Kota Binjai tahun 2025-2030 mengacu pada RPJMD Kota Binjai 2025-2030 dalam rangka perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu. Pembangunan pendidikan di Kota Binjai tahun 2025-2030 dilaksanakan melalui 6 program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
6. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program-program pembangunan tersebut diarahkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagaimana diuraikan dalam Bab IV. Pada Tabel 6.1. akan dijelaskan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan yang ingin dicapai lima tahun ke depan.

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2026 – 2030**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETT.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	219.237.205.183,00	100	230.199.065.442,15	100	241.709.018.714,26	100	253.794.469.649,97	100	266.484.193.132,47	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	20.415.000,00	100	21.435.750,00	100	22.507.537,50	100	23.632.914,38	100	24.814.560,09	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	20.415.000,00	1	21.435.750,00	1	22.507.537,50	1	23.632.914,38	1	24.814.560,09	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	216.747.111.268,00	100	227.584.466.831,40	100	238.963.690.172,97	100	250.911.874.681,62	100	263.457.468.415,70	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1800	209.112.435.278,00	1800	230.364.057.041,00	1800	250.932.259.893,00	1800	272.463.872.888,00	1800	293.407.066.533,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	1.500.347.990,00	1	1.575.365.389,50	1	1.654.133.658,98	1	1.736.840.341,92	1	1.823.682.359,02
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1	614.328.000,00	1	645.044.400,00	1	677.296.620,00	1	711.161.451,00	1	746.719.523,55
Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	563.705.670,00	100	591.890.953,50	100	621.485.501,18	100	652.559.776,23	100	685.187.765,05
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	32.401.500,00	1	34.021.575,00	1	35.722.653,75	1	37.508.786,44	1	39.384.225,76
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1	302.509.670,00	1	317.635.153,50	1	333.516.911,18	1	350.192.756,73	1	367.702.394,57
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan		1	46.094.500,00	1	48.399.225,00	1	50.819.186,25	1	53.360.145,56	1	56.028.152,84
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundang		1	41.040.000,00	1	43.092.000,00	1	45.246.600,00	1	47.508.930,00	1	49.884.376,50

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

	an												
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	141.660.000,00	1	148.743.000,00	1	156.180.150,00	1	163.989.157,50	1	172.188.615,38	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	600.000.000,00	100	630.000.000,00	100	661.500.000,00	100	694.575.000,00	100	729.303.750,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebe		3	250.000.000,00	3	262.500.000,00	3	275.625.000,00	3	289.406.250,00	3	303.876.562,50	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100	200.000.000,00	100	210.000.000,00	100	220.500.000,00	100	231.525.000,00	100	243.101.250,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	1.022.893.245,00	1	1.074.037.907,25	1	1.127.739.802,61	1	1.184.126.792,74	1	1.243.333.132,38	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat		1	450.000.000,00	1	472.500.000,00	1	496.125.000,00	1	520.931.250,00	1	546.977.812,50	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

	Menyurat												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	308.293.245,00	1	323.707.907,25	1	339.893.302,61	1	356.887.967,74	1	374.732.366,13	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	264.600.000,00	1	277.830.000,00	1	291.721.500,00	1	306.307.575,00	1	321.622.953,75	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25	283.080.000,00	25	297.234.000,00	25	312.095.700,00	25	327.700.485,00	25	344.085.509,25	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		48	38.420.000,00	48	40.341.000,00	48	42.358.050,00	48	44.475.952,50	48	46.699.750,13	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6	44.660.000,00	6	46.893.000,00	6	49.237.650,00	6	51.699.532,50	6	54.284.509,13	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5	200.000.000,00	5	210.000.000,00	5	220.500.000,00	5	231.525.000,00	5	243.101.250,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			100	39.231.775.200,00	100	41.193.363.960,00	100	43.253.032.158,00	100	45.415.683.765,90	100	47.686.467.954,20
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD/M I/Paket A % 100 APK SD/M I/Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/M I/Paket A Angka Putus Sekolah SD/M I/Paket A Angka Melanjutkan (AM) dari SD/M I ke		100	16.200.000.000,00	100	17.010.000.000,00	100	17.860.500.000,00	100	18.753.525.000,00	100	19.691.201.250,00
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru S		165	900.000.000,00	165	945.000.000,00	165	992.250.000,00	165	1.041.862.500,00	165	1.093.955.625,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah		100	900.000.000,00	100	945.000.000,00	100	992.250.000,00	100	1.041.862.500,00	100	1.093.955.625,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100	900.000.000,00	100	945.000.000,00	100	992.250.000,00	100	1.041.862.500,00	100	1.093.955.625,00

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kela		100	900.000.000,00	100	945.000.000,00	100	992.250.000,00	100	1.041.862.500,00	1001	1.093.955.625,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		100	900.000.000,00	100	945.000.000,00	100	992.250.000,00	100	1.041.862.500,00	100	1.093.955.625,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		100	900.000.000,00	100	945.000.000,00	100	992.250.000,00	100	1.041.862.500,00	100	1.093.955.625,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		8	900.000.000,00	8	945.000.000,00	8	992.250.000,00	8	1.041.862.500,00	8	1.093.955.625,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah		2	900.000.000,00	2	945.000.000,00	2	992.250.000,00	2	1.041.862.500,00	2	1.093.955.625,00	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah		4	900.000.000,00	4	945.000.000,00	4	992.250.000,00	4	1.041.862.500,00	4	1.093.955.625,00	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah		100	900.000.000,00	100	945.000.000,00	100	992.250.000,00	100	1.041.862.500,00	100	1.093.955.625,00	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		100	900.000.000,00	100	945.000.000,00	100	992.250.000,00	100	1.041.862.500,00	100	1.093.955.625,00	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		8	900.000.000,00	8	945.000.000,00	8	992.250.000,00	8	1.041.862.500,00	8	1.093.955.625,00	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		1	900.000.000,00	1	945.000.000,00	1	992.250.000,00	1	1.041.862.500,00	1	1.093.955.625,00	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terselenggaranya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		1	900.000.000,00	1	945.000.000,00	1	992.250.000,00	1	1.041.862.500,00	1	1.093.955.625,00	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		1	900.000.000,00	1	945.000.000,00	1	992.250.000,00	1	1.041.862.500,00	1	1.093.955.625,00	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terselenggaranya peningkatan kualitas pendidikan		1	4.900.000.000,00	1	4.945.000.000,00	1	5.692.250.000,00	1	5.986.250.000,00	1	6.093.955.625,00	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		1	900.000.000,00	1	945.000.000,00	1	992.250.000,00	1	1.041.862.500,00	1	1.093.955.625,00	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs/Paket B% 100 APK SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Angka M elanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SM A/SM K/M A Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tida		100	12.350.000.000,00	100	12.967.500.000,00	100	13.615.875.000,00	100	14.296.668.750,00	100	15.011.502.187,50	
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru		20	650.000.000,00	20	682.500.000,00	20	716.625.000,00	20	752.456.250,00	20	790.079.062,50	
Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Pembangunan Asrama Sekolah		5	650.000.000,00	5	682.500.000,00	5	716.625.000,00	5	752.456.250,00	5	790.079.062,50	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		25	650.000.000,00	25	682.500.000,00	25	716.625.000,00	25	752.456.250,00	25	790.079.062,50	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah		20	650.000.000,00	20	682.500.000,00	20	716.625.000,00	20	752.456.250,00	20	790.079.062,50	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		20	650.000.000,00	20	682.500.000,00	20	716.625.000,00	20	752.456.250,00	20	790.079.062,50	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		20	650.000.000,00	20	682.500.000,00	20	716.625.000,00	20	752.456.250,00	20	790.079.062,50	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		25	650.000.000,00	25	682.500.000,00	25	716.625.000,00	25	752.456.250,00	25	790.079.062,50	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Persentase tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		10	650.000.000,00	10	682.500.000,00	10	716.625.000,00	10	752.456.250,00	10	790.079.062,50	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100	650.000.000,00	100	682.500.000,00	100	716.625.000,00	100	752.456.250,00	100	790.079.062,50	
Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase tersedianya Pengadaan Mebel Sekolah		100	650.000.000,00	100	682.500.000,00	100	716.625.000,00	100	752.456.250,00	100	790.079.062,50	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah		100	650.000.000,00	100	682.500.000,00	100	716.625.000,00	100	752.456.250,00	100	790.079.062,50	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		100	650.000.000,00	100	682.500.000,00	100	716.625.000,00	100	752.456.250,00	100	790.079.062,50	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		1	650.000.000,00	1	682.500.000,00	1	716.625.000,00	1	752.456.250,00	1	790.079.062,50	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1	650.000.000,00	1	682.500.000,00	1	716.625.000,00	1	752.456.250,00	1	790.079.062,50	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terselenggaranya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		1	650.000.000,00	1	682.500.000,00	1	716.625.000,00	1	752.456.250,00	1	790.079.062,50	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		20	650.000.000,00	20	682.500.000,00	20	716.625.000,00	20	752.456.250,00	20	790.079.062,50	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		25	650.000.000,00	25	682.500.000,00	25	716.625.000,00	25	752.456.250,00	25	790.079.062,50	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas		1	3.650.000.000,00	1	4.082.500.000,00	1	4.116.625.000,00	1	4.352.456.250,00	1	4.490.079.062,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		1	650.000.000,00	1	682.500.000,00	1	716.625.000,00	1	752.456.250,00	1	4.490.079.062,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		100	6.650.965.200,00	100	6.983.513.460,00	100	7.332.689.133,00	100	7.699.323.589,65	100	8.084.289.769,13
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		10	200.000.000,00	10	210.000.000,00	10	220.500.000,00	10	231.525.000,00	10	243.101.250,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		15	259.085.200,00	15	272.039.460,00	15	285.641.433,00	15	299.923.504,65	15	314.919.679,88
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAU		30	245.890.000,00	30	258.184.500,00	30	271.093.725,00	30	284.648.411,25	30	298.880.831,81

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD		100	500.000.000,00	100	525.000.000,00	100	551.250.000,00	100	578.812.500,00	100	607.753.125,00	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		100	230.000.000,00	100	241.500.000,00	100	253.575.000,00	100	266.253.750,00	100	279.566.437,50	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya tersedianya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		3008	127.590.000,00	3025	133.969.500,00	3050	140.667.975,00	3075	147.701.373,75	3100	155.086.442,44	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		100	450.900.000,00	105	473.445.000,00	110	497.117.250,00	115	521.973.112,50	120	548.071.768,13	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD		100	4.500.000.000,00	105	4.725.000.000,00	110	4.961.250.000,00	115	5.209.312.500,00	120	5.469.778.125,00	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		100	137.500.000,00	105	144.375.000,00	110	151.593.750,00	115	159.173.437,50	120	167.132.109,38	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			100	4.030.810.000,00	100	4.232.350.500,00	100	4.443.968.025,00	100	4.666.166.426,25	100	4.899.474.747,56	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		10	135.400.000,00	10	142.170.000,00	10	149.278.500,00	10	156.742.425,00	10	164.579.546,25
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		10	357.600.000,00	10	375.480.000,00	10	394.254.000,00	10	413.966.700,00	10	434.665.035,00
Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		10	254.000.000,00	10	266.700.000,00	10	280.035.000,00	10	294.036.750,00	10	308.738.587,50
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		50	250.000.000,00	50	262.500.000,00	50	275.625.000,00	50	289.406.250,00	50	303.876.562,50
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		18	235.000.000,00	18	246.750.000,00	18	259.087.500,00	18	272.041.875,00	18	285.643.968,75

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		18	122.600.000,00	18	128.730.000,00	18	135.166.500,00	18	141.924.825,00	18	149.021.066,25
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		100	325.000.000,00	100	341.250.000,00	100	358.312.500,00	100	376.228.125,00	100	395.039.531,25
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		40	210.000.000,00	40	220.500.000,00	40	231.525.000,00	40	243.101.250,00	40	255.256.312,50
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		6	123.000.000,00	6	129.150.000,00	6	135.607.500,00	6	142.387.875,00	6	149.507.268,75
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		1	1,784,910,000.00	1	1,874,155,500.00	1	1,967,863,275.00	1	2,066,256,438.75	1	2,169,569,260.69

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		1	233.300.000,00	1	244.965.000,00	1	257.213.250,00	1	270.073.912,50	1	283.577.608,13
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			100	1.200.000.000,00	100	1.260.000.000,00	100	1.323.000.000,00	100	1.389.150.000,00	100	1.458.607.500,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah muatan lokal dalam kurikulum (Seni Budaya) Pendidikan Dasar		3	100.000.000,00	3	105.000.000,00	3	110.250.000,00	3	115.762.500,00	3	121.550.625,00
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasa	Terselenggaranya Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		900	100.000.000,00	900	105.000.000,00	900	110.250.000,00	900	115.762.500,00	900	121.550.625,00

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah muatan lokal dalam kurikulum (Seni Budaya) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		100	1.100.000.000,00	100	1.155.000.000,00	100	1.212.750.000,00	100	1.273.387.500,00	100	1.337.056.875,00	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terselenggaranya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terselenggaranya Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		400	100.000.000,00	400	105.000.000,00	400	110.250.000,00	400	115.762.500,00	400	121.550.625,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			100	400.000.000,00	100	420.000.000,00	100	441.000.000,00	100	463.050.000,00	100	486.202.500,00
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 100 Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/M I) Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah (SMP/MTs) Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/M I)		100	200.000.000,00	100	210.000.000,00	100	220.500.000,00	100	231.525.000,00	100	243.101.250,00

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah (SMP/MTs)												
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Diklat Berjenjang, Parenting Literasi, Capacity Building, Pengembangan Keprofesian, MGMP, KKG dan PPG bagi tingkat TK, SD, dan SMP Kota Binjai	80	100.000.000,00	80	105.000.000,00	80	110.250.000,00	80	115.762.500,00	80	121.550.625,00		

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya pengelola tunjangan, pembinaan dan motivasi PTK, penyelenggaraan OGN, sinkronisasi angka kredit dan apresiasi bagi TK, SD, dan SMP Kota Binjai		70	100.000.000,00	70	105.000.000,00	70	110.250.000,00	70	115.762.500,00	70	121.550.625,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			100	200.000.000,00	100	210.000.000,00	100	220.500.000,00	100	231.525.000,00	100	243.101.250,00	
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase sekolah Persentase sekolah SMP/MTs yang memiliki izin SD/MI yang memiliki izin %		70	100.000.000,00	70	105.000.000,00	70	110.250.000,00	70	115.762.500,00	70	121.550.625,00	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terselenggaranya Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase sekolah PAUD yang memiliki izin		100	100.000.000,00	100	105.000.000,00	100	110.250.000,00	100	115.762.500,00	100	121.550.625,00	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terselenggaranya Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			100	1.000.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	1.800.000.000,00	
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	1.000.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	1.800.000.000,00	
Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Persentase Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah		80	500.000.000,00	80	600.000.000,00	80	700.000.000,00	80	800.000.000,00	80	900.000.000,00	

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah	Persentase Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah		80	500.000.000,00	80	600.000.000,00	80	700.000.000,00	80	800.000.000,00	80	900.000.000,00	
--	---	--	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	--

Adapun daftar Subkegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kota Binjai dalam mendukung prioritas pembangunan daerah pada tabel dibawah ini :

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI DALAM Mendukung PRIORITY PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Iklim Keamanan SMP	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Iklim Kebhinekaan SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Iklim Kebinekaan SMP	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Iklim Inklusivitas SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Iklim Inklusivitas SMP	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Iklim Keamanan SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu ada pendapat lain yang menjelaskan indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja sering disamakan dengan ukuran kinerja. Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut :

1. Biaya pelayanan
2. Penggunaan
3. Kualitas dan standar pelayanan
4. Cakupan pelayanan
5. Kepuasan

Indikator kinerja bisa berbeda untuk setiap organisasi, namun setidaknya ada persyaratan umum untuk terwujudnya suatu indikator yang ideal. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak serta proses.
5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif. Data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Pemerintah daerah dapat melakukan sejumlah perbandingan dalam upaya melakukan pengukuran kinerja di organisasinya. Beberapa perbandingan yang bisa dilakukan antara lain:

1. Membandingkan kinerja tahun ini dengan kinerja tahun lalu.
2. Membandingkan kinerja tahun ini dengan berbagai standar yang diturunkan dari pemerintah pusat atau dari daerah sendiri.
3. Membandingkan kinerja unit atau seksi yang ada pada sebuah departemen dengan unit atau seksi departemen lain yang menyediakan jasa layanan yang sama.
4. Membandingkan dengan berbagai ketentuan pada sektor swasta.
5. Membandingkan semua bidang dan fungsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan bidang dan fungsi yang sama pada pemerintah daerah lain.

Dengan melihat uraian diatas Dinas Pendidikan Kota Binjai telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD seperti yang tertulis pada tabel 6.1. berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Skor Literasi/Numerasi	Persentase	80,56	80,58	80,60	80,62	80,64	80,66	
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,49	11,64	11,80	11,97	12,13	12,28	
	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	01.18	01.18	01.18	01.18	01.18	01.18	
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	79,86	79,88	79,90	79,92	79,94	79,96	
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,27	14,35	14,43	14,52	14,61	14,69	
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	99,02	99,04	99,06	99,08	99,1	99,12	
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	87,70	88,80	89,90	90,00	91,10	92,20	
	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persentase	90,11	90,22	90,33	90,44	90,55	90,66	
	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	70,52	70,54	70,56	70,58	70,60	70,02	
	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persentase	75,15	75,25	75,35	75,45	75,55	75,65	

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,27	14,35	14,43	14,52	14,61	14,69	
	Kemampuan literasi berkategori baik (%)	Persen	59,16	60,25	61,34	62,44	63,54	64,63	
	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	11,49	11,64	11,80	11,97	12,13	12,28	

BAB VIII

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Pendidikan Kota Binjai dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2029.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan ini diharapkan dapat mendukung terbitnya dokumen perencanaan yang berkualitas di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Binjai. Tantangan yang diuraikan dalam bab sebelumnya memerlukan tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan pendidikan yang tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong dan tambal sulam melainkan diperlukan langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan pada jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan berkualitas tinggi.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Binjai ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Jajaran Dinas Pendidikan maupun para pemangku kepentingan pendidikan

Binjai, September 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA BINJAI



Solhan Syahputera Siregar, S.STP, M.AP
Pembina TK I
NIP. 19870331 200602 1 001